

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palestina merupakan salah satu negara Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Lautan Tengah di sebelah barat dan sungai Yordan di sebelah timur. Sedangkan di sebelah utara Palestina berbatasan dengan Lebanon dan daerah Sinai Mesir di selatan. Lokasi yang berdekatan antara satu negara dengan negara lain membuat konflik yang timbul di kawasan Timur Tengah tidak jauh dari konflik perebutan wilayah. Begitupula dengan konflik Palestina dan Israel yang hingga kini telah menarik perhatian dunia internasional. Selain menyebabkan banyak penduduk sipil mengungsi, konflik Palestina dan Israel menyebabkan berkurangnya wilayah Palestina hingga 22% yang semula adalah 44% (Shun, 2022). Meskipun wilayahnya semakin berkurang namun semangat Palestina meraih kepentingan negaranya yaitu meraih kedaulatan tidak berkurang sedikitpun. Begitu juga dukungan dan aspirasi yang diberikan negara Arab di kawasan Timur Tengah.

Sejumlah 132 negara telah mengakui negara Palestina dalam sidang forum PBB. Uni Emirat Arab termasuk salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang juga memberikan dukungan dalam upaya pembebasan Palestina dari Israel bersama Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Uni Emirat Arab memiliki kesamaan sebagai negara muslim seperti halnya dengan Palestina. Sebelumnya Palestina dan UEA memiliki hubungan yang baik dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pariwisata.

Dukungan Uni Emirat Arab yang diberikan kepada Palestina mencakup dukungan kemerdekaan, ekonomi, dan jaminan keamanan diri daripada pengungsi Palestina. Diketahui UEA memberikan dukungan kemerdekaan melalui keikutsertaan UEA menjadi ketua dalam ajang KTT Liga Arab ke-31 yang menyatakan bahwa UEA akan terus mendukung kedaulatan Palestina. Kemudian dalam hal bantuan ekonomi, selama konflik Israel-Palestina pada Mei 2021, UEA memberikan bantuan senilai \$25 juta USD untuk membantu Palestina. Terakhir, dalam hal bantuan keamanan UEA diketahui memberikan bantuan keamanan dan infrastruktur keamanan di wilayah Palestina khususnya di wilayah Tepi Barat.

Hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel kerap kali dikaitkan dengan aktivitas perpolitikan di kawasan Timur Tengah. Negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berlatarbelakang memiliki kesamaan budaya dan sistem pemerintahan juga bersikap antagonis terhadap Israel. Bukan tanpa alasan, sikap negara-negara Arab didasari atas berdirinya Israel sebagai negara Zionis dan terjadinya perang Arab-Israel sehingga menyebabkan kesan traumatik bagi banyak negara di Timur Tengah (Ulrichsen, 2016). Presiden pertama UEA sejak awal menyatakan bahwa Israel merupakan ancaman keamanan dan musuh bagi Uni Emirat Arab. Hal ini diperjelas dalam aksi UEA mendukung keputusan Liga Arab dan *Gulf Cooperation Council's* (GCC) perihal Israel. Selain itu sejak tahun 1948, Uni Emirat Arab melakukan pemblokiran seperti jalur transportasi, jaringan telepon, dan melarang masuknya orang Israel ke Uni Emirat Arab atas Liga Arab (Zaga, 2018). Menurut negara Arab, Israel tidak sepatutnya merdeka atas wilayah Palestina sehingga penolakan negara-negara Arab menyebabkan gejolak konflik antar negara Arab dengan Israel. Hal ini menyebabkan Israel tidak mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat karena negara Arab menunjukkan sikap prosolidaritas terhadap Palestina (Wicaksono, 2020).

Hanya saja ditengah tidak adanya hubungan, sudah terjalin hubungan kerjasama secara tidak langsung antara UEA dan Israel dalam beberapa sektor diantaranya di bidang ekonomi dan pertahanan. Namun karena keterbatasan dalam kedua bidang tersebut, kerjasama dilakukan secara multilateral dan diwakili oleh beberapa aktor negara saja. Peningkatan aktivitas antara dua negara terlihat sejak tahun 2018 dimana duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon berkunjung ke UEA pada November 2016. Hubungan UEA dengan Israel kemudian merambah ke beberapa aktivitas seperti misalnya di tahun 2018, atlet Israel diperbolehkan untuk bertanding mewakili negaranya dalam ajang turnamen olahraga judo di Uni Emirat Arab (Times of Israel, 2018).

Amerika Serikat sebagai negara dengan cita-cita membentuk perdamaian dunia tidak tinggal diam melihat konflik ini. Amerika Serikat sendiri memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Israel, hal ini membuat Palestina merasa tidak adil ditambah dengan berbagai isu seperti pengesahan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pemindahan kantor kedutaan Amerika Serikat ke Tel Aviv, Israel, hingga penghilangan tanda wilayah Palestina pada peta. Meskipun sampai sebatas isu, Palestina merasa tidak terima dengan tindakan Amerika Serikat ini sehingga sulit bagi Palestina untuk menerima perjanjian damai yang ditawarkan.

Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Donald Trump, berulang kali mengajukan mosi perdamaian bagi dua pihak. Hal ini kemudian bertentangan dengan aktivitas dari Israel.

Israel melakukan ekspansi ke tepi barat, dimana secara wilayah tersebut merupakan wilayah Palestina. Palestina terbagi dua kubu antara Fatah dan Hamas, hal ini membuat sulitnya terjadi negosiasi dengan Israel. Aspek terakhir yang mempengaruhi sulitnya negosiasi antara Palestina dan Israel adalah Israel skeptis terhadap keseriusan pemerintah Palestina untuk berdamai, begitupun sebaliknya.

Puncak aktivitas dari kedua negara antara Uni Emirat Arab dan Israel yang mengejutkan banyak negara di dunia yaitu adanya normalisasi hubungan kedua belah pihak ditandai dengan adanya Abraham Accords (Wicaksono, 2020). Momen sejarah tersebut bertepatan pada tanggal 13 November 2020 yang diinisiasi juga oleh Trump, presiden Amerika Serikat saat itu. Inisiasi pemulihan hubungan tersebut tidak akan terlaksana tanpa ada campur tangan oleh Amerika Serikat. Diketahui UEA merupakan negara ketiga di kawasan Timur Tengah yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania serta disusul negara Arab lainnya yaitu Bahrain dan Turki.

Dengan lahirnya *join statement* Abraham Accords antara UEA dengan Israel telah mengubah cara pandang serta menimbulkan pertanyaan baru mengenai perdamaian yang diimpikan oleh Palestina. Masyarakat internasional beranggapan bahwa terjadinya aktivitas normalisasi ini merupakan sebuah langkah besar dalam menanamkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dalam artian lebih luas. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh beberapa negara Arab di kawasan Timur Tengah dalam normalisasi hubungan dengan Israel bersamaan dengan masa pemerintahan Presiden Donald Trump dimasa akhir jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dituliskan di atas maka penulis menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana dampak normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel terhadap kepentingan Palestina?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Pengertian politik luar negeri menurut Joshua Goldstein adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan tindakan mereka dalam dunia internasional (Goldstein, 1999). Sedangkan menurut K. J. Holsti, politik luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam politik (Holsti, 1983). Berdasarkan definisi tersebut, politik luar negeri dapat dipahami

sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara berupa perilaku dan gagasan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta dalam rangka memenuhi kepentingan nasional suatu negara dalam politik internasional.

Setiap negara mempunyai tujuan berbeda dalam melakukan politik luar negerinya, akan tetapi negara dalam melakukan politik luar negerinya memiliki tujuan dalam rangka memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kepentingan kolektifnya. K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan – tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu :

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Diantara ketiganya, nilai atau *values* daripada tujuan politik luar negeri Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki kesamaan sehingga melatarbelakangi aktivitas normalisasi. Kepentingan nasional Uni Emirat Arab dalam pemulihan hubungan dengan Israel dipengaruhi oleh poros kekuasaan politik dimana UEA dan Israel merupakan dua negara sahabat Amerika Serikat. Kekuasaan politik ini berpengaruh terhadap aspek kepentingan politik, keamanan, ekonomi, serta perdamaian. Dalam aspek keamanan, UEA merasa perlu menjalin hubungan jual-beli senjata dengan Israel guna meningkatkan kekuatannya melawan Iran. Di sisi yang lain, UEA berharap mampu mengangkat ekonominya terutama pasca pandemic COVID-19 dengan Israel dan adanya diversifikasi pendapatan negara.

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (*national interest*) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori atau keinginan suatu negara yang berdaulat. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional. Namun kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam Negara yang menghadapi kondisi yang berlainlainan tersebut.

Kepentingan nasional lahir dikarenakan adanya kebutuhan dari suatu Negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari aspek politik, ekonomi, militer, maupun sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Dalam kepentingan nasional, peran ‘negara’ sebagai aktor yang

mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam pergaulan internasional serta berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.

Menurut Thomas W. Robinson, terdapat beberapa klasifikasi kepentingan nasional, yakni:

1. *Vital interest* didefinisikan sebagai kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Dalam hal ini semua negara berhak mempertahankan melalui pengorbanan besar sehingga kepentingan nasional ini tidak dapat dikompromikan.
2. *Secondary interest* meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perdamaian.

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Sebelum adanya perjanjian *join statement* Abraham Accords di tahun 2020 yang ditandatangani oleh UEA dan Israel, kepentingan nasional Palestina sangat didukung oleh Uni Emirat Arab berupa dukungan kemerdekaan, ekonomi, keamanan, dan dukungan moral. Uni Emirat Arab mendukung penuh kemerdekaan Palestina di tanah airnya sendiri atas Israel dan mengutuk seluruh kebijakan yang dibuat oleh Israel terhadap Palestina (Pradana & Yulianti, 2018). UEA berulang kali menolak tegas rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat Timur Tengah. Kedua, Uni Emirat Arab mendukung Palestina dengan menjamin keamanan dari invasi perang wilayah atas Israel. Hubungan UEA-Palestina ini dibuktikan dengan adanya kantor perwakilan UEA di Ramallah, Palestina sementara Palestina memiliki kantor kedutaan besar di Abu Dhabi. Selain itu, banyak orang Palestina yang sengaja datang dan tinggal di wilayah Uni Emirat Arab untuk mendapatkan pekerjaan (Hamad, 2020). Ketiga, dukungan UEA terhadap Palestina dalam bidang ekonomi berbentuk bantuan dana keuangan yang bertujuan untuk membantu warga Palestina yang ikut berperang dan pemulihan stabilitas ekonomi terutama dalam hal ekonomi dalam negeri dan penanaman modal asing di Palestina.

Setelah adanya pemulihan hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 membuat beberapa kepentingan nasional Palestina terancam berkurang atau bahkan tidak diberikan lagi. Palestina menganggap normalisasi hubungan UEA-Israel adalah perbuatan tercela dan bentuk pengkhianatan terhadap Al-Aqsa, Yerusalem, dan perjuangan atas rakyat Palestina (Rahma, 2020). Lebih lanjut, aktivitas keamanan antara Palestina dengan Uni Emirat Arab juga mengalami kerenggangan pasca UEA menormalisasi hubungannya dengan Israel. Hal ini dibuktikan dengan penarikan duta besar Palestina dari Uni Emirat Arab sebagai bentuk protes agar segera membatalkan perjanjian. Sementara itu, setelah adanya normalisasi hubungan UEA dengan Israel juga berdampak dalam sektor ekonomi dimana bantuan yang diberikan oleh UEA kepada Palestina dipangkas menjadi \$1 juta USD atau sebesar 14 miliar rupiah yang sebelumnya adalah 726,7 miliar rupiah (Sicca, 2021).

Kepentingan nasional Palestina akan berdampak dan terancam tidak lagi diberikan oleh UEA setelah adanya aktivitas pemulihan hubungan dengan Israel. Dalam hal ini, *vital interest* kepentingan nasional Palestina yang paling penting adalah mendapatkan pengakuan kemerdekaan yang diupayakan oleh rakyat Palestina melawan Israel yang hingga kini masih berjalan. Lebih lanjut, *secondary interest* daripada kepentingan nasional Palestina adalah kepentingan ekonomi, keamanan, dan dukungan moral yang diberikan oleh UEA.

UEA percaya bahwa hubungan yang ia jalin kembali dengan Israel adalah sebuah bentuk konsistensi solusi terhadap dua negara tersebut. Namun, bagaimanapun kesepakatan normalisasi tersebut tetap menjadi sebuah pukulan berat bagi Palestina. Kerugian yang diterima oleh Palestina bukan lagi materi, namun juga berkurangnya dukungan moral atas negara-negara Arab dan menurunnya keamanan perdamaian Palestina. Bagi Palestina, yang wilayah kedaulatannya semakin tergerus oleh aneksasi Israel, kehadiran dan solidaritas negara-negara Arab tetangganya dalam mendukung perjuangan kemerdekaannya sangat dibutuhkan.

2. Teori Sistem Internasional

Teori sistem internasional dikemukakan oleh James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff melalui bukunya yang berjudul *Contending theories of international relations*. Dalam teori ini, Dougherty dan Pfaltzgraff mengartikan sistem internasional sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang saling terkait dalam suatu kerangka yang kompleks, termasuk negara-negara, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996).

Dalam sistem internasional, negara adalah aktor utama. Mereka berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Negara juga memiliki hubungan ekonomi, politik, dan budaya dengan negara lain yang berkontribusi terhadap keseluruhan dinamika sistem internasional. Negara sering membentuk aliansi untuk melindungi kepentingan mereka dan menciptakan keseimbangan kekuatan yang merata dalam politik global.

Dougherty dan Pfaltzgraff menekankan bahwa sistem internasional beroperasi berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip tertentu, yang memengaruhi perilaku negara-negara dan aktor-aktor lainnya di dalamnya. Mereka juga berpendapat bahwa sistem internasional merupakan sistem yang dinamis, yang terus berubah seiring waktu karena perubahan dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi di dalam dan di luar sistem itu sendiri.

Sistem internasional terus berubah dan berkembang ketika negara bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mengembangkan perjanjian dan kebijakan internasional. Proses dinamis inilah yang membantu mendefinisikan politik global dan membentuk dunia kita saat ini. Hal ini didasarkan pada sistem terdiri atas banyak komponen dan saling berkaitan. Aktivitas yang hadir antara aktor dalam sistem internasional menyebabkan sebuah perubahan dan menjadi pengaruh kepada perubahan pada komponen atau aktor lainnya.

Dalam hal ini, perubahan pola aktivitas yang terjadi antara Uni Emirat Arab dengan Israel pasca normalisasi hubungan pada 2020 akan menyebabkan perubahan kepada Palestina. Hubungan yang terbentuk setelah Abraham Accords yang disebabkan oleh faktor masing-masing negara baik UEA dan Israel seperti faktor ekonomi, politik, dan keamanan akan berdampak kepada capaian kepentingan Palestina (Wicaksono, 2020). Perubahan tersebut ditandai dengan berkurangnya dukungan UEA kepada Palestina dalam hal dukungan kemerdekaan, ekonomi, dan keamanan kepada Palestina dalam usahanya merdeka atas wilayahnya.

Kesimpulannya sistem internasional menyoroti tindakan dari satu aktor dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap aktor-aktor lain di dalam sistem itu. Serta menekankan pentingnya melihat sistem internasional dalam kerangka jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor di dalamnya (Dougherty & Pfaltzgraff, 1996).

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mendapatkan hipotesa berupa normalisasi hubungan UEA dengan Israel berdampak kepada :

Terancamnya kepentingan nasional Palestina yang dibagi menjadi dua kriteria yaitu *vital interest* dan *secondary interest*.

1. *Vital interest* berupa kedaulatan wilayah Palestina yang hingga kini terus diperjuangkan melawan Israel.
2. Berkurangnya capaian *secondary interest* bagi Palestina yaitu dalam hal kepentingan ekonomi dan keamanan dari Uni Emirat Arab sebagai sesama negara Muslim.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan faktor Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatic dengan Israel pada tahun 2020.
2. Mendeskripsikan dampak yang dirasakan oleh Palestina pasca normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel setelah tahun 2020.

F. Metodologi Penelitian dan Analisa Data

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini didasarkan pada ciri - ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis tentang arti data itu. Adapun tujuan dari penggunaan metode kualitatif deskriptif adalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul guna menganalisis isu normalisasi ini yang melibatkan Israel dan Uni Emirat Arab serta mengupas dampak pemulihan hubungan terutama bagi kepentingan nasional Palestina. Kemudian dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan

(*library research*) melalui berbagai literatur seperti buku - buku, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen resmi yang dapat diakses secara *online* (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan untuk mencegah pembahasan penelitian menjadi terlalu luas dan kurang efektif. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai factor politik luar negeri yang melatarbelakangi normalisasi hubungan UEA-Israel sebelum tahun 2020 dan dampak yang ditimbulkan bagi Palestina setelah adanya perjanjian Abraham di tahun 2022.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi empat bab. Dalam keempat bab ini, penulis akan menjelaskan secara detail setiap sub bab yang mengandung topik yang berbeda. Sehingga pada setiap sub bab, pembahasan yang disajikan memiliki korelasi antara satu sub bab dengan sub bab lainnya. Penjabaran setiap sub bab ini disampaikan secara runtut agar informasi secara keseluruhan dapat membentuk sebuah karya tulis yang terstruktur dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan menjadi empat bab yakni:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi delapan poin penting. Poin pertama yaitu latar belakang masalah dari isu yang diangkat. Pada latar belakang dijelaskan mengenai focus kepentingan besar negara Palestina dan Israel sebagai sebuah negara kendala bagi Palestina. Lebih lanjut, dinamika perjuangan Palestina untuk mendapatkan dukungan dari negara Arab sangat kuat. UEA merespon pemulihan hubungan dengan tetap mendukung perjuangan Palestina sekaligus menentang negara Israel. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana dampak normalisasi hubungan UEA-Israel terhadap Palestina setelah tahun 2020. Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulis dapat mengkaji hipotesis awal dari permasalahan isu yang diangkat. Selain itu penulis juga menjabarkan tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab kelanjutan yang berisi mengenai gambaran umum terkait kepentingan Palestina yaitu kepentingan atas wilayahnya di Yerusalem dan dukungan UEA kepada Palestina sebelum adanya Abraham Accords serta dinamika hubungan UEA dengan Israel sampai dengan adanya Abraham Accords pada tahun 2020. Terakhir, faktor yang

melatarbelakangi Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel. Bab ini akan berfokus pada kepentingan awal Palestina dan bentuk dukungan UEA kepada Palestina, hubungan UEA-Israel sebelum adanya Abraham Accords serta faktor yang melatarbelakangi normalisasi sehingga berdampak pada perjanjian perdamaian antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang dilatarbelakangi oleh kepentingan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

BAB III merupakan pembahasan bab lanjutan yang akan menjelaskan mengenai analisa dampak yang diterima Palestina atas peristiwa normalisasi hubungan UEA-Israel hingga tahun 2022. Pada bab ini, penulis akan memperlihatkan bahwa dampak yang diterima oleh Palestina atas pemulihan hubungan Uni Emirat Arab-Israel adalah keterancaman posisi Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat karena banyak negara Arab memilih pro terhadap Israel dalam hal politik luar negeri. Kepentingan nasional Palestina yang terancam pasca aksi pemulihan hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel adalah dalam sektor *vital interest* dan *secondary interest*. Dalam hal ini kepentingan vital atau yang paling krusial yang harus dimiliki oleh Palestina adalah pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Sedangkan kepentingan *secondary interest* Palestina yang terancam adalah dampak ekonomi dan dampak keamanan. Kedua aspek ini sangat memengaruhi politik Palestina dalam fungsinya melaksanakan mengambil keputusan luar negerinya.

BAB IV merupakan bab yang akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini yang telah dibahas pada bab sebelumnya.